

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa persepsi wartawan memiliki kompleksitas dalam menyikapi uji kompetensi wartawan. Terdapat wartawan yang menerima uji kompetensi sebagai bentuk penerapan aturan yang telah ditetapkan, wartawan yang kritis terhadap kebijakan uji kompetensi wartawan, tapi tetap menerima dan mengikuti proses uji kompetensi, serta wartawan yang menolak kebijakan tersebut. Kompleksitas persepsi para informan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural, institusional, sosiokultural, dan historis yang melingkupi para informan maupun uji kompetensi wartawan itu sendiri.

Jika dikategorisasikan, terdapat tiga macam persepsi wartawan dalam memandang uji kompetensi. Kategori pertama adalah wartawan yang menerima uji kompetensi wartawan untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, Dewan Pers, dan organisasi profesi, kedua, wartawan yang kritis terhadap uji kompetensi wartawan, dan ketiga adalah wartawan yang menolak uji kompetensi wartawan.

Penelitian ini juga menyimpulkan adanya gap antara tujuan idealis uji kompetensi wartawan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan; melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas; melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat; menjaga kehormatan profesi

wartawan; dan menghindarkan dari penyalagunaan profesi wartawan dengan realitas uji kompetensi wartawan di lapangan. Gap ini terjadi karena masih adanya pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang dalam prosesnya ditemukan adanya pelanggaran aturan dan tidak konsistennya lembaga uji kompetensi wartawan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Tidak adanya respon dari perusahaan media tempat wartawan bekerja, serta tidak adanya perbedaan antara wartawan yang telah lulus uji kompetensi wartawan dan yang tidak mengikuti uji kompetensi wartawan di mata narasumber dari berbagai instansi pemerintah, militer maupun swasta, ditambah dengan tidak adanya korelasi positif antara sertifikat wartawan dengan jenjang karier dan pendapatan wartawan.

Adanya gap antara idealitas uji kompetensi wartawan dengan realitas di lapangan ini mengakibatkan uji kompetensi wartawan belum diterima sepenuhnya sebagai indikator profesionalisme bagi wartawan di Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk sejumlah pihak terkait:

1. Dewan Pers

- Melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang selama ini telah dilakukan. Evaluasi

ini terutama terkait kredibilitas lembaga penguji, standar pengujian dan transparansi proses uji kompetensi.

- Mendorong uji kompetensi wartawan sebagai sistem pembinaan dan pengembangan profesi wartawan secara berkelanjutan. Tidak hanya sebagai proses sertifikasi semata.
- Mendorong perusahaan media untuk mengintegrasikan proses uji kompetensi wartawan ke dalam manajemen perusahaan agar uji kompetensi wartawan mempunyai nilai praktis dan mempunyai dampak pada pengembangan karier dan kesejahteraan wartawan.

2. Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan DPR RI

- Bekerjasama dengan Dewan Pers menyusun regulasi yang lebih tegas terkait pendirian media massa dan sertifikasi profesi wartawan, termasuk kontrol terhadap media abal-abal dan wartawan tidak profesional.
- Mengkaji kebijakan kebebasan pers di era kemajuan digital untuk melindungi wartawan dan perusahaan pers agar tetap independen dan profesional serta membangun ekosistem kebebasan pers yang bertanggungjawab di tengah kemajuan teknologi informasi digital.

3. Perusahaan Pers di Indonesia

- Memberikan dukungan nyata dan penghargaan kepada wartawan yang telah lulus uji kompetensi berupa bonus, peningkatan honor/ gaji, kesempatan jenjang karier, atau kesempatan pelatihan dan atau magang berkelanjutan di dalam perusahaan.
- Menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan profesional, melalui peningkatan kapasitas wartawan secara berkelanjutan di internal perusahaan.

4. Organisasi Profesi Wartawan

- Mengawal independensi dan obyektifitas proses pelaksanaan uji kompetensi wartawan agar menjadi wadah pembinaan wartawan secara berkala dan menjauhkannya dari intervensi dari pihak manapun.
- Memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi wartawan di daerah dengan pendekatan etika, integritas, dan tanggung jawab sosial profesi wartawan.

5. Individu Wartawan

- Jadikan uji kompetensi wartawan sebagai wadah refleksi diri dan penyegaran materi serta keterampilan jurnalistik.
- Terus meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran mandiri maupun melalui komunitas di daerah dan organisasi profesi

wartawan agar terus relevan dengan perkembangan keilmuan jurnalistik, terutama di tengah kemajuan teknologi digital.

6. Penelitian Selanjutnya

- Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi geografis lebih luas, dan melibatkan Informan penelitian yang lebih beragam seperti pemilik media, manajemen redaksi, maupun dengan *stakeholder* Dewan Pers dan unsur pemerintah.
- Penelitian mendalam tentang persepsi wartawan dengan melihat secara lebih dalam hubungan pengetahuan, pendidikan, organisasi profesi, latar belakang wartawan, dan kultur masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu.